

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Kabupaten Sragen

Halaman 2 dan 15

Bupati Tuding Dewan Inkgari Kesepakatan

Kusdinar Enggan Tanda Tangan APBD P 2018

SRAGEN-Pembangunan di Kabupaten Sragen terancam macet total, menyusul hasil paripurna APBD Perubahan 2018 tidak menemui kata sepakat antara Eksekutif dan Legeslatif. Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati maupun Ketua Dewan Bambang Samekto kompak menolak menandatangani hasil sidang paripurna tentang APBD Perubahan.

Karena anggaran Rp 2,57 miliar untuk proyek Jembatan Gambiran Sine yang mendahului anggaran, dicoret secara

sepihak dalam rapat paripurna. Anggaran tersebut ditolak oleh empat fraksi karena dinilai berpotensi bermasalah hukum.

Dikatakan Bupati Yuni, pihaknya menolak menandatangani hasil paripurna, karena pihak legeslatif dinilai mengingkari hasil Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

"Keadaan itulah membuat kami menolak menandatangani hasil paripurna APBD Perubahan 2018. Sebenarnya bila sebatas catatan dan tidak mengubah soal angka tidak masalah, namun terjadi pe-

rubahan anggaran dinilai menyalahi komitmen awal dalam KUA-PPAS yang menyetujui penganggaran proyek jembatan Sine," tutur Bupati pada wartawan, Kamis (27/9).

Menurut Bupati, penganggaran soal perbaikan jembatan Sine sendiri memang kebutuhan yang mendesak. Perbaikan itupun sesuai kajian dari pihak Sadantas Polres Sragen, Dishub maupun instansi terkait, karena memang kondisinya rusak dan harus diperbaiki untuk arus mudik saat lebaran kemarin. "Dewan telah mengingkari kesepakatan. Kenapa saat rapat banggar anggaran tersebut di-

setujui, tapi mendadak dicoret sesaat sebelum disahkan dalam rapat paripurna. Akhirnya kami putuskan untuk tidak menandatangani APBD Perubahan tersebut," ujarnya.

Konsekuensi tidak adanya tandatangan bupati tersebut, berarti jalannya roda pemerintahan Sragen akan terganggu karena tidak adanya APBD

Perubahan. Berbagai program pembangunan yang telah dirancang juga terancam batal karena tidak adanya anggaran. "Tidak apa-apa, ini menjadi

■ Baca **BUPATI TUDING** ...hal 15

pembelajaran bersama. Silakan warga Sragen menilai sendiri, kenapa APBD Perubahan batal disahkan. Untuk roda pemerintahan tetap bisa berjalan karena kita masih bisa pakai APBD penetapan," jelas Yuni.

Sementara Ketua DPRD Sragen, Bambang Samekto juga menyayangkan terjadinya pengingkaran oleh sejumlah fraksi saat paripurna penetapan APBD Perubahan. Apalagi saat rapat banggar, item anggaran pembangunan Jembatan Gambiran sudah disepakati. "Saya sepakat dengan bupati tidak tandatangan APBD Perubahan. Teman-teman dewan tidak konsisten damengingkari kesepakatan bersama," tegasnya.

Totok, panggilan akrab Bam-

bang Samekto meminta seluruh anggota Banggar untuk mengembalikan dana atau biaya kunjungan konsultasi ke Jakarta beberapa waktu lalu. Karena, hasil konsultasi ke Kemendagri ternyata tidak dipakai sebagai rujukan dan diingkari. "Karena teman-teman banggar tidak memakai hasil konsultasi dan memilih dengan keputusannya sendiri, lebih baik biaya konsultasi dikembalikan. Menjadi lucu saat uang saku konsultasi diterima, tapi hasil konsultasi tidak dipakai acuan," tambahnya.

Saat disinggung kerugian terbesar dari tidak disahkannya APBD Perubahan ini, Totok dengan tegas menyatakan bahwa yang paling dirugikan adalah warga

Sragen. Karena, praktis nanti tidak ada pembangunan seperti yang telah dirancang sebelumnya dalam APBD Perubahan. Tidak hanya itu, teman-teman anggota dewan juga merugi karena dana aspirasi dewan senilai Rp 47 miliar juga tidak bisa cair.

"Padahal sebentar lagi masa kampanye pileg. Saya tidak bisa bayangkan teman-teman dewan tidak bisa mencairkan dana aspirasi yang biasa dipakai untuk kampanye," tuturnya.

Disisi lain Wakil Ketua DPRD Sragen Bambang Widjo Purwanto menegaskan, pihaknya tetap akan mengirim hasil sidang paripurna APBD Perubahan ke Gubernur, meski tidak di tanda tangani Bupati. (ars/saf)